

ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN NELAYAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA

Policy Analysis Towards Karimunjawa Fisherman Catching Activity Regency Jepara

Bambang Argo Wibowo¹, Herry Boesono¹, Aryo Bayu Aditomo²

¹Staf Pengajar Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

²Mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

Masuk : 13 Maret 2012, diterima : 1 Mei 2012

ABSTRAK

Balai Taman Nasional Karimunjawa sejak Tahun 1998 telah merintis kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik melalui peningkatan perekonomian, penguatan kelembagaan, penciptaan mata pencaharian alternatif, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan Taman Nasional Karimunjawa. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks ini bisa jadi menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Oleh karenanya, dibutuhkan kajian lebih lanjut tentang apakah konservasi keanekaragaman hayati yang terwujud dalam zonasi Taman Nasional Karimunjawa benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan dan bagi keberlanjutan ekologi. Terlebih lagi, nelayan hanya bekerja di sekitar terumbu karang di perairan dangkal, sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran sistem Zonasi Taman Nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sementara metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT dan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan zonasi Taman Nasional Karimunjawa adalah peningkatan pengamanan daerah konservasi, peningkatan kerjasama antara BTN, DKP, dan Dinas Pariwisata untuk menjaga potensi terumbu karang agar sumberdaya perikanan tetap lestari, pengalokasian dana dari pemerintah untuk membantu BTN melakukan pengawasan terhadap *overfishing*, *illegal fishing*, dan penanggulangan pencemaran lingkungan dari alat tangkap yang merusak, dan pemberian sosialisasi secara terpadu untuk menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan sumberdaya.

Kata kunci : zonasi Taman Nasional Karimunjawa, konservasi keanekaragaman hayati, AHP (*Analytical Hierarchy Process*)

ABSTRACT

Karimunjawa National Park has pioneered in community development activities either through economic development, institutional strengthening, creation of alternative livelihoods and community capacity building since 1998. This activity was expected to raise the public's readiness to participate in maintaining and preserving the Karimunjawa National Park. However, the participation in this context could place people as an object, not as a subject. Therefore, further study is needed on whether the conservation of biological diversity embodied in the Karimunjawa National Parks zoning really gave positive impact on fishing communities and ecological sustainability. Moreover, fishermen only operate around coral reefs in shallow waters, making it very vulnerable to the violation of the National Park system zoning. The research method used in this research was descriptive method, while the sampling method used is purposive sampling. Data analysis methods used were SWOT and AHP analysis (Analytical Hierarchy Process). Policy strategies to overcome the issue of the National Parks zoning is increased security in Karimunjawa conservation areas, increased cooperation between the BTN, DKP, and Tourism Department to maintain the potential of coral reef fishery resources in order to remain sustainable, the allocation of funds from the government to assist BTN monitored overfishing, illegal fishing, and environmental pollution from damaged fishing gear, and the provision of an integrated socialization to encourage people to keep conserving the resources.

Key words: Karimunjawa National Park zoning, biodiversity conservation, AHP (*Analytical Hierarchy Process*)

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati yang dipertahankan melalui konsep konservasi merupakan sebuah langkah penting yang harus diambil pemerintah untuk memastikan agar keseimbangan ekosistem di Indonesia tetap terjaga (Dahuri, 2002). Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi tersebut dilakukan untuk menjamin terciptanya perlindungan terhadap sumber daya alam kawasan serta terjaminnya akses masyarakat terhadap sumber alam tersebut untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan (Monintja, 2001). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56 /Menhut-II/2006 pasal 1, Zonasi Taman Nasional dibedakan menjadi tujuh, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi dan zona khusus. Pedoman zonasi ini diperuntukkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan Taman Nasional yang efektif dan optimal sesuai dengan fungsinya (Maksum, 2005).

Pelaksanaan konservasi tak jarang mengurangi akses masyarakat terhadap tempat mereka menggantungkan hidup. Pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan yang berkelanjutan menjadi konsep penting dalam melihat masalah tersebut. Tidak ada masyarakat yang secara sengaja menghambat keberlangsungan hidup lingkungan mereka, tetapi dengan terus berlangsungnya masalah lingkungan yang disebabkan oleh dampak negatif kegiatan manusia, merupakan tanda bahwa keberlanjutan memang masih diragukan (Sulaksono *et al.*, 2004). Keberlanjutan bukan merupakan akhir yang harus dicapai, tetapi target yang secara terus menerus harus dinegosiasikan sementara masyarakat belajar mengenali gejala ketidakberlanjutan (Mitchell *et al.* 2007).

Menyadari nilai strategis yang dimiliki Kepulauan Karimunjawa, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi (Cagar Alam Laut) pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1999 melalui Keputusan Menhutbun No.78/Kpts-II/1999, Cagar Alam Karimunjawa dan perairan sekitarnya seluas 111.625 Ha diubah menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ). Pada tahun 2001 sebagian kawasan Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam. Perubahan status kawasan tersebut dilakukan untuk mengakomodir keberadaan masyarakat yang telah

tinggal dan menetap di wilayah Kepulauan Karimunjawa, agar dapat memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui sistem zonasi (Irnawati, 2008).

Kawasan konservasi laut (*Marine Protected Area/MPA*) merupakan kawasan ekosistem laut yang ditujukan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, sumberdaya alam dan budaya setempat, yang dikelola berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku (Surochiem, 2001). Oleh karenanya penetapan kawasan lindung dapat dianggap sebagai instrumen yang terkait dengan aspek ekologis dan kelembagaan/hukum secara bersamaan. Meski demikian, penetapan kepulauan Karimunjawa sebagai Kawasan Konservasi Laut/Taman Nasional menyebabkan masyarakat harus melakukan proses adaptasi dalam menjalankan strategi nafkahnya, terutama terkait dengan adanya sistem zonasi kawasan Taman Nasional (Faiza, 2004).

Balai Taman Nasional Karimunjawa sejak Tahun 1998 telah merintis kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik melalui peningkatan perekonomian, penguatan kelembagaan, penciptaan mata pencaharian alternatif, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan Taman Nasional Karimunjawa. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks ini bisa jadi menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek (Supardan *et al.*, 2006). Oleh karenanya, dibutuhkan kajian lebih lanjut tentang apakah konservasi keanekaragaman hayati yang terwujud dalam Zonasi Taman Nasional Karimunjawa benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan dan bagi keberlanjutan ekologi. Terlebih lagi, nelayan hanya bekerja di sekitar terumbu karang di perairan dangkal, sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran sistem Zonasi Taman Nasional (Nurmalasari, 2010).

Terkait dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi dari segi teknis operasional berbagai alat tangkap yang beroperasi di Karimunjawa, menganalisis efektivitas kebijakan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam pengaturan daerah penangkapan dalam hubungannya dengan pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan di Taman Nasional Karimunjawa, mengetahui tentang kepatuhan nelayan setempat terhadap undang-undang atau peraturan perikanan tentang aktivitas penangkapan ikan di Kepulauan Karimunjawa, dan menganalisis kebijakan

pemerintah terhadap aktivitas penangkapan ikan di perairan Kepulauan Karimunjawa. Sementara, penelitian ini dilakukan selama bulan Maret-April 2012 yang berpusat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

MATERI DAN METODE

Metode yang dipakai bersifat deskriptif melalui survey lapangan dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2007), metode deskriptif merupakan jenis studi kasus yang mempunyai keunggulan sebagai suatu studi untuk mendukung studi-studi yang besar di kemudian hari. Studi kasus dapat memberikan hipotesa-hipotesa untuk penelitian lanjutan. Dari segi edukatif, studi kasus dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi baik dalam perumusan masalah, penggunaan statistik dalam menganalisa atas cara-cara perumusan generalisasi dan kesimpulan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*) dan studi pustaka. Data primer yang digunakan dalam penelitian :

1. Deskripsi responden
2. Kondisi nelayan
3. Klasifikasi dan macam alat tangkap

Dalam penelitian ini, selain wawancara terhadap nelayan, juga dilakukan wawancara terhadap:

1. Institusi yang terkait
2. Tokoh masyarakat, dan
3. Pemerintah desa

Sementara itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara
2. Laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
3. Data monografi Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara
4. Literatur lain yang terkait dengan tujuan dari penelitian ini.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Random Sampling*. Menurut Sugiyono (2007), metode *Purposive Sampling* adalah cara pengambilan sampel bukan didasarkan atas random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Untuk penentuan jumlah sampel nelayan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Masyarakat yang bermatapencaharian utama adalah sebagai nelayan
2. Nelayan yang bertempat tinggal atau menetap di desa Karimunjawa
3. Nelayan yang masih aktif, yaitu masih aktif dalam melakukan kegiatan penangkapan di laut.

4. Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan di perairan Taman Nasional Karimunjawa.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dalam Panayotou (1985), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = derajat kecermatan (0,099)

sehingga besarnya sampel adalah

$$n = \frac{2340}{2340 \times (0,099)^2 + 1}$$

n = 97,76 ~ 100

Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dari responden. Data tersebut yang nantinya akan dianalisis untuk mengevaluasi kebijakan perikanan tangkap yang ada di Karimunjawa. Setelah data-data hasil wawancara tersebut terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan analisis SWOT hingga didapat hasil dan kesimpulannya (Rangkuti, 2000).

2. Analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*)

AHP adalah salah satu alat analisis dalam pengambilan keputusan yang baik dan fleksibel. Metode ini berdasarkan pada pengalaman dan penilaian dari pelaku/pengambil keputusan. Metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty ini, digunakan terutama sekali untuk membantu pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk dipertimbangkan.

AHP pada dasarnya di desain untuk menangkap persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu

melalui prosedur yang di desain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai alternatif. Metode ini menyusun masalah-masalah dalam bentuk hirarki dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif. Kekuatan AHP terletak pada rancangannya yang bersifat holistik, menggunakan logika, pertimbangan berdasarkan intuisi, data kuantitatif dan preferensi kualitatif (Saaty, 1993)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Armada dan alat tangkap

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Desa Karimunjawa

No	Jenis Armada	Jumlah (Unit)
1	Perahu Tanpa Motor	-
2	Motor Tempel	140
3	Kapal Motor	250

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kapal motor di perairan Karimunjawa sebanyak 250 unit dan motor tempel sebanyak 140 unit. Ini menunjukkan bahwa armada penangkap ikan di Karimunjawa telah mengalami cukup banyak modernisasi. Tidak adanya jumlah perahu tanpa motor juga membuktikan bahwa armada penangkap ikan di Karimunjawa termasuk dalam golongan armada yang maju.

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Alat Penangkap Ikan di Desa Karimunjawa

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1	<i>Spear Gun</i>	175
2	Pancing Tonda	135
3	Pancing Ulur	190
4	Bubu	70
5	<i>Gill Net</i>	5
6	Pancing Cumi	570
7	Bagan Perahu	30

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar alat tangkap ikan yang beroperasi di Karimunjawa adalah alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya alat tangkap berupa *spear gun*, pancing ulur, pancing cumi,

bubu, dan *gill net*, yang masing-masing berjumlah 175 buah, 190 buah, 570 buah, 70 buah, dan 5 buah. Masing-masing alat tangkap tersebut merupakan alat tangkap pasif dimana saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, menggunakan bantuan arus air. Selain itu, sasaran tangkapnya adalah ikan yang telah berukuran cukup besar, bergantung pada ukuran umpan yang dipasang pada alat tangkap.

2. Prasarana dan sarana perikanan

Terdapat empat bangunan infrastruktur perikanan yang dikelola pemerintah Kabupaten di Kepulauan Karimunjawa. Keempat bangunan itu adalah pabrik es batu, bengkel las perahu, balai pemijahan ikan dan tempat pelelangan ikan (TPI). Berdasarkan hasil wawancara, dari keempat sarana tersebut yang masih berjalan saat ini adalah pabrik es batu dan bengkel las kapal. Untuk pabrik es batu, dulunya sempat tidak berfungsi karena air sebagai bahan baku es bukan berasal dari air tawar melainkan air payau. Ini menyebabkan daya tahan es kurang apabila dibandingkan dengan es yang berbahan baku air tawar. Akan tetapi, dengan pengadaan sumur air tawar di dekat pabrik, pabrik es ini dapat berjalan kembali. Untuk balai pembenihan ikan, saat ini sedang dalam proses penggiatan kembali benih-benih ikan, terutama ikan kerapu. Untuk TPI, sarana ini tidak berjalan karena para nelayan lebih memilih untuk menjual hasil tangkapannya kepada para tengkulak. Hal ini dikarenakan, para tengkulak tersebut telah memberikan modal yang cukup besar kepada para nelayan Karimunjawa untuk dapat menjalankan usaha penangkapan ikannya. Sehingga nelayan telah memiliki ikatan terhadap para tengkulak tersebut.

3. Pengetahuan nelayan tentang peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa

Tabel 3. Tingkat pengetahuan nelayan tentang peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa

Kategori	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase (%)
Pengetahuan nelayan sangat rendah	0	0
Pengetahuan nelayan rendah	23	23
Pengetahuan nelayan sedang	27	27
Pengetahuan nelayan tinggi	41	41
Pengetahuan nelayan sangat tinggi	9	9
Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan pada tabel diatas dimana 41% nelayan menyatakan bahwa mereka mempunyai pengetahuan terhadap peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa yang tinggi, bahkan 9% dari responden menyatakan bahwa mereka mempunyai tingkat pengetahuan terhadap peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di Karimunjawa telah mengetahui adanya peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa. Tetapi sebanyak 27% responden menyatakan bahwa tingkat pengetahuan mereka terhadap peraturan zonasi sedang, bahkan sebanyak 23% menyatakan tidak mengetahui peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa. Hal ini menandakan masih ada nelayan yang tidak mengetahui tentang peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa

4. Tingkat kepatuhan nelayan terhadap peraturan zonasi

Tabel 4. Kepatuhan nelayan terhadap peraturan zonasi

Kategori	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase (%)
Kepatuhan nelayan sangat rendah	8	8
Kepatuhan nelayan rendah	11	11
Kepatuhan nelayan sedang	11	11
Kepatuhan nelayan tinggi	56	56
Kepatuhan nelayan sangat tinggi	14	14
Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan pada tabel diatas dimana 56% nelayan menyatakan bahwa mereka patuh terhadap peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa yang, bahkan 14% dari responden menyatakan bahwa mereka sangat patuh terhadap peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di Karimunjawa telah mematuhi peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa. Namun sebanyak 11% responden menyatakan bahwa tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan zonasi sedang, bahkan sebanyak 8% menyatakan mereka kurang mematuhi peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa. Hal ini menandakan masih ada nelayan yang belum menaati peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa.

5. Pendapat nelayan tentang zona perlindungan

Zona perlindungan merupakan kawasan perairan yang diperuntukkan sebagai wilayah perlindungan spesies, habitat ataupun ekosistem yang bisa mendukung fungsi dari zona inti. Wilayah perairan yang termasuk kedalam zona rimba/perlindungan adalah perairan Gosong Tengah, Cemara Kecil, P. Sintok, P. Geleang, P. Burung, P. Katang, Gosong Selukur, dan Tanjung Gelam. Sedangkan wilayah daratan meliputi hutan hujan tropis dataran rendah dan hutan mangrove.

Tabel 5. Pendapat nelayan tentang zona perlindungan dapat dilakukan kegiatan penangkapan

Kategori	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase (%)
Nelayan Sangat Tidak Setuju	6	6
Nelayan Tidak Setuju	23	23
Nelayan Kurang Setuju	18	18
Nelayan Setuju	32	32
Nelayan Sangat Setuju	21	21
Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebanyak 32% responden menyatakan setuju terhadap adanya kegiatan penangkapan di zona perlindungan, bahkan sebanyak 21% responden sangat menyetujui adanya kegiatan penangkapan di zona perlindungan. Akan tetapi, sebanyak 23% responden menyatakan tidak setuju terhadap kegiatan penangkapan di zona perlindungan. Besarnya presentasi nelayan yang menyatakan setuju terhadap kegiatan penangkapan di zona perlindungan menandakan bahwa masyarakat nelayan belum mengetahui dan memahami isi peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa.

6. Pendapat nelayan terhadap pembagian daerah zonasi Taman Nasional Karimunjawa

Dalam membuat peraturan tentang zonasi Taman Nasional Karimunjawa, BTN selaku otoritas manajemen yang mengelola fungsi taman nasional sebagai kawasan perlindungan alam selalu melibatkan masyarakat khususnya nelayan. Hal ini dikarenakan tempat nelayan mencari ikan adalah di laut dan daerah-daerah pembagian zonasi juga meliputi wilayah laut. Tetapi menurut kebanyakan nelayan Karimunjawa menyatakan

pembagian daerah zonasi Taman Nasional Karimunjawa masih kurang adil bagi mereka.

Tabel 6. Pendapat nelayan mengenai pembagian daerah zonasi

Kategori	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase (%)
Sangat Tidak Adil	8	8
Tidak Adil	13	13
Kurang Adil	51	51
Adil	28	28
Sangat Adil	0	0
Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas sebesar 51% responden/nelayan menyatakan bahwa pembagian wilayah zonasi Taman Nasional Karimunjawa masih terasa kurang adil, bahkan sebesar 8% responden menyatakan pembagian zonasi Taman Nasional Karimunjawa sangat tidak adil. Akan tetapi, ada juga responden yang menyatakan pembagian zonasi Taman Nasional Karimunjawa sudah cukup adil, yakni sebesar 28%. Banyaknya nelayan yang masih merasa pembagian area zonasi Taman Nasional Karimunjawa masih belum adil yaitu sebesar 51% dapat menjadi pertimbangan bagi BTN dan stakeholder lain untuk melakukan revisi zonasi yang baru dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi nelayan setempat. Nelayan merasa pembagian area tersebut belum adil dikarenakan area yang dijadikan sebagai tempat zonasi merupakan daerah dimana mereka biasa menangkap ikan. Apabila area tersebut dijadikan daerah zonasi, maka nelayan tersebut harus mencari tempat daerah lain lagi untuk dijadikan sebagai daerah penangkapan ikan bagi mereka.

7. Pengaruh peraturan zonasi terhadap pendapatan nelayan

Kebanyakan nelayan di Karimunjawa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada musim kemarau, yakni antara bulan Mei-September. Hal ini dikarenakan pada musim kemarau gelombang tidak tinggi seperti pada musim hujan. Selain itu, kebanyakan nelayan di Karimunjawa juga memiliki kapal dan alat tangkap yang masih tradisional, sehingga kebanyakan dari mereka tidak berani melaut pada saat musim hujan.

Tabel 7. Pengaruh peraturan zonasi terhadap pendapatan nelayan

Kategori	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase (%)
Sangat Tidak Berpengaruh	21	21
Tidak Berpengaruh	33	33
Kurang Berpengaruh	31	31
Berpengaruh	12	12
Sangat Berpengaruh	3	3
Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dimana 33% nelayan menyatakan bahwa adanya peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa tidak berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Sebanyak 21% responden menyatakan adanya peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa sangat tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Akan tetapi masih ada responden yang menyatakan adanya peraturan zonasi mempengaruhi pendapatan mereka, yakni sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan nelayan. Para nelayan menyatakan masih banyaknya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, sehingga dengan adanya pembagian daerah untuk konservasi para nelayan tetap masih dapat mencari ikan di perairan lain yang memang sudah diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan.

8. Pengaruh peraturan zonasi terhadap hasil tangkapan nelayan

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada nelayan Karimunjawa menyatakan bahwa pengaruh peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa terhadap hasil tangkapan nelayan dari melaut adalah sedikit atau kurang berpengaruh.

Tabel 8. Pengaruh peraturan zonasi terhadap hasil tangkapan nelayan

Kategori	Jumlah Nelayan (Orang)	Persentase (%)
Sangat Tidak Berpengaruh	15	15
Tidak Berpengaruh	32	32
Kurang Berpengaruh	34	34
Berpengaruh	13	13
Sangat Berpengaruh	6	6
Jumlah	100	100

Sumber : hasil penelitian, 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa 32% responden menyatakan dengan adanya peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan mereka. Bahkan sebanyak 15% responden menyatakan adanya peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa sangat tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Akan tetapi masih ada responden sebesar 13% yang menyatakan adanya peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Hal ini, sama halnya dengan pendapatan nelayan yang tidak berpengaruh terhadap adanya peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa, yang dikarenakan masih banyaknya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, sehingga dengan adanya pembagian daerah konservasi, nelayan masih bisa mencari ikan di wilayah perairan lain yang masih luas.

9. Evaluasi pelaksanaan peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa terhadap BTN

Balai Taman Nasional (BTN) merupakan otoritas manajemen yang mengelola fungsi taman nasional sebagai kawasan perlindungan alam. Adanya kondisi tersebut diatas menuntut sebuah pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak untuk dapat saling bekerjasama. Permasalahan yang dirasakan dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa selama ini adalah terbatasnya koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam pengelolaan. Hal lain adalah tidak adanya kesamaan visi, misi, dan program-program yang terpadu antara pihak-pihak terkait seperti Balai Taman Nasional, Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan wilayah Kepulauan Karimunjawa.

10. Pengawasan kawasan Taman Nasional Karimunjawa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BTN, dana merupakan faktor penting dalam melakukan kegiatan pengawasan kawasan zonasi. Hal ini dikarenakan diperlukan biaya yang realtif mahal untuk melakukan kegiatan pengawasan atau operasi daerah zonasi meningat luasnya kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Kegiatan operasi atau pengawasan dapat mencapai 7 hari lamanya dan biaya-biaya tersebut meliputi bahan bakar untuk kapal speed boat dan biaya perbekalan. Selain masalah biaya, kurangnya apresiasi dan keikutsertaan masyarakat juga menyebabkan semakin sulitnya proses-proses pengawasan untuk dilakukan. Beberapa masalah lain dalam pengamanan kawasan di Taman Nasional Karimunjawa adalah sistem pengamanan yang belum strategis dan partisipatif, kurangnya sumberdaya dan sarana, sulitnya birokrasi yang menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran serta tidak adanya kesamaan pemahaman antara balai dengan masyarakat.

Alternatif strategi yang mendapat prioritas utama untuk dipilih sebagai kebijakan adalah alternatif strategi yang menempati 4 besar. Keempat strategi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Dengan demikian, strategi utama yang dapat diterapkan sebagai rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan zonasi di Karimunjawa adalah sebagai berikut :

1. Strategi pertama, peningkatan pengamanan daerah konservasi agar potensi sumberdaya perikanan tetap terjaga dan dapat dijadikan daerah penangkapan ikan yang mengacu pada kaidah konservasi dengan jumlah skor 2.856.
2. Strategi kedua, kerjasama antara BTN, DKP, dan Dinas Pariwisata untuk menjaga potensi terumbu karang agar sumberdaya perikanan tetap lestari untuk dimanfaatkan dan juga untuk kegiatan pariwisata dengan jumlah skor 2.812.
3. Strategi ketiga, mengalokasikan dana dari pemerintah untuk membantu BTN melakukan pengawasan terhadap overfishing, illegal fishing, dan penanggulangan pencemaran lingkungan dari alat tangkap yang merusak dengan jumlah skor 2.763.

Strategi keempat, memberikan sosialisasi secara terpadu untuk menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan sumberdaya bukan hanya terumbu karang tetapi juga kelestarian sumberdaya ikan dengan jumlah skor 2.7

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah :

1. Nelayan Karimunjawa sebagian besar memiliki kapal yang merupakan jenis kapal motor dan motor tempel, dengan alat tangkap yang berupa *spear gun*, pancing tonda, pancing ulur, bubu, muroami, pancing cumi, *gill net*, dan jaring angkat (branjang).
2. Hasil evaluasi peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa adalah kurang berjalannya peraturan zonasi karena Balai Taman Nasional Karimunjawa menghadapi berbagai kendala, diantaranya yaitu masalah pendanaan dalam melakukan pengawasan terhadap daerah zonasi Taman Nasional Karimunjawa.
3. Tingkat pengetahuan nelayan terhadap peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa cukup tinggi dan tingkat kepatuhan nelayan terhadap peraturan zonasi Taman Nasional Karimunjawa juga cukup tinggi.
4. Hasil analisa SWOT dan AHP diperoleh strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan zonasi Taman Nasional Karimunjawa sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pengamanan daerah konservasi.
 - b. Peningkatan kerjasama antara BTN, DKP, dan Dinas Pariwisata untuk menjaga potensi terumbu karang agar sumberdaya perikanan tetap lestari.
 - c. Pengalokasian dana dari pemerintah untuk membantu BTN melakukan pengawasan terhadap *overfishing*, *illegal fishing*, dan penanggulangan pencemaran lingkungan dari alat tangkap yang merusak, dan
 - d. Pemberian sosialisasi secara terpadu untuk menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan sumberdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri R. 2002. Paradigma Baru Pengembangan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bogor: IPB.
- Faiza R. 2004. Kajian beberapa aspek program pemberdayaan masyarakat pesisir nelayan pengolah Muara Angke. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Irnawati R. 2008. Pengembangan perikanan tangkap di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Jawa Tengah. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Maksum MA. 2005. Analisis manfaat ekonomi sumberdaya perikanan kawasan konservasi laut taman nasional karimunjawa. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Kehutanan No. 78/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Sebagai Kawasan Pelestarian Alam. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2001. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 79/IV/Set-3/2005 Tentang Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional Karimunjawa. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Mitchell B, Setiawan B, Rahmi DH. 2007. Pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Bulaksumur, Yogyakarta.
- Monintja D. dan Yusfiandayani R. 2001. Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. 56-65.
- Nurmalasari Yessy. 2010. Analisis pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Panayotou. 1985. *Small-Scale Fisheries in Asia: an Introduction and Overview. Proceeding of Small-scale fisheries in Asia: socio-economic analysis and policy*. Ottawa-Canada. IDRC. 283.
- Rangkuti, F. 2000. Analisa SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Pemimpin. Pt. Pusaka Binaman Pressindo. Gramedia, Jakarta.

- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R n D. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sulaksono, Ari dan Amin Setiawan.2004. Model Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Pembangunan Masyarakat Pantai Dalam Implementasi Proyek Cofish di Jawa Tengah, Makalah Seminar dan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Pembangunan Masyarakat Pantai.
- Supardan A, Haluan J, Manuwoto, Soemokaryo S. 2006. *Maximum Sustainable Yield (MSY) dan Aplikasinya pada Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Teluk Lasongko Kabupaten Buton*. Buletin PSP (15):35-49.
- Surochiem, 2001. Dimensi-Dimensi Penting Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Partisipasi pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Neptunus*, Vol8, No 1 Maret 2001,Surabaya, 50-56.